

...erwriter and Joint bookrunner



LAPORAN
KINERJA KPKNL
DENPASAR
TAHUN 2024

Pa

PENGANTAR

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Denpasar atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam Menyusun laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Denpasar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur DJKN Nomor KEP-245/KN/2020.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Denpasar pada tahun 2024 adalah 113,90%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *stakeholder perspective* dengan capaian kinerja 33,01% (bobot 30%), *customer perspective* dengan capaian kinerja 22,83% (bobot 20%), *internal process perspective* dengan capaian kinerja 28,90% (bobot 25%), dan *learning & growth perspective* dengan capaian kinerja 29,16% (bobot 25%).

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, semoga Laporan Kinerja KPKNL Denpasar dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Denpasar



Ditandatangani secara elektronik
I Ketut Arimbawa



DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
Aspek Strategis dan Permasalahan utama	3
Bab II Perencanaan Kinerja	6
Perjanjian Kinerja	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	9
Capaian Kinerja Organisasi	9
Realisasi Anggaran	49
Bab IV Penutup	50
Penutup	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Denpasar berada dalam naungan dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Dalam pelaksanaan tugas KPKNL Denpasar dituntut untuk *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggara *good governance* adalah Akuntabilitas yang mana dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara, maka Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

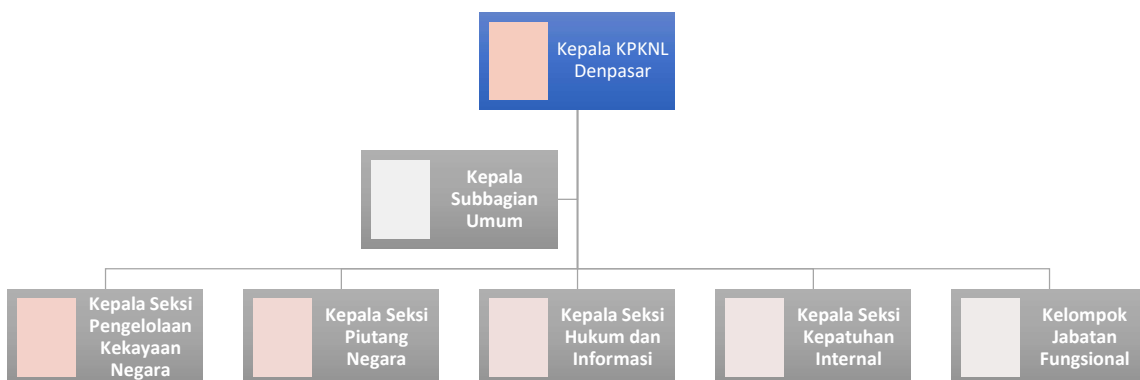
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL Denpasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- 3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 10) Pelaksanaan administrasi KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan demikian, tidak ada lagi Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Pelayanan Penilaian. Struktur Organisasi KPKNL Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur Organisasi KPKNL Denpasar



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Denpasar meliputi Kota Denpasar, kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Denpasar didukung oleh 36 pegawai (data per 31 Desember 2024), yang terdiri dari 1 orang Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 orang Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian Umum/Seksi), 13 orang Pejabat Fungsional dan 15 orang Pelaksana.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

KPKNL memiliki peran strategis yaitu sebagai kantor pemerintah pemberian pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam hal penilaian kekayaan negara, inventarisasi barang milik negara/daerah, pengelolaan Barang Milik Negara, pengamanan kekayaan negara yang berupa piutang macet yang ada pada debitur dan penggalakkan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pemasukan negara serta mempercepat laju perekonomian di tanah air.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang agar dapat mencapai target yang ditetapkan maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yaitu visi DJKN yang diharapkan dapat menjadi penggerak pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi DJKN yaitu : **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Selanjutnya visi DJKN dijabarkan dalam bentuk misi yang diemban. Untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan lagi dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang nyata dirumuskan secara jelas. Adapun misi KPKNL Denpasar yang juga merupakan misi DJKN adalah sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;

- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Realisasi KPKNL Denpasar dalam melaksanakan misi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan system komputerisasi, pembuatan bukti kepemilikan dan monitoring kekayaan negara;
- 3) Menyediakan informasi jumlah dan nilai riil kekayaan negara;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan bersaing sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;
- 6) Menjadi revenue center dengan memaksimalkan PNBPN, hasil dari pemanfaatan bmn, bea lelang, dan biaya administrasi penagihan piutang negara.

Implementasi terhadap misi yang akan dicapai telah ditetapkan dalam pola dan tujuan. Terdapat 8 (delapan) tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Denpasar yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi Pemerintah;
- 4) Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti;
- 5) Peningkatan pelayanan penilaian;
- 6) Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- 7) Peningkatan pelayanan lelang;
- 8) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Upaya KPKNL Denpasar untuk mencapai tujuan tersebut kemudian disusun dalam sasaran strategis yang akan ditempuh dalam suatu periode tertentu. Sifatnya spesifik, dapat dinilai dalam angka, dan berorientasi pada jangka waktu

tertentu (1 tahun), yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- 2) Kepuasan pegguaan layanan;
- 3) Kepatuhan yang tinggi atas peraturan pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Pelayanan yang berkualitas;
- 5) Penatausahaan dan Pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- 6) Pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang yang optimal;
- 7) Edukasi yang efektif;
- 8) Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- 9) SDM yang kompetitif;
- 10) Organisasi yang kondusif;
- 11) Sistem manajemen informasi yang andal;
- 12) Pengelolaan anggaran yang optimal.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada sejumlah tujuan diantaranya yaitu Penerimaan Negara yang Optimal, serta Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali. Sasaran strategis dari tujuan ini adalah: pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Adapun Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan b) Indeks efektivitas investasi pemerintah. Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah merumuskan rencana strategi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Denpasar harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Denpasar. Sasaran Strategis KPKNL Denpasar Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2024. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2024 memuat 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu Three KPKNL Denpasar 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	71,50%
		2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,50%
3	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%
4	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100%
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo BKPN	77%
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	7a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%

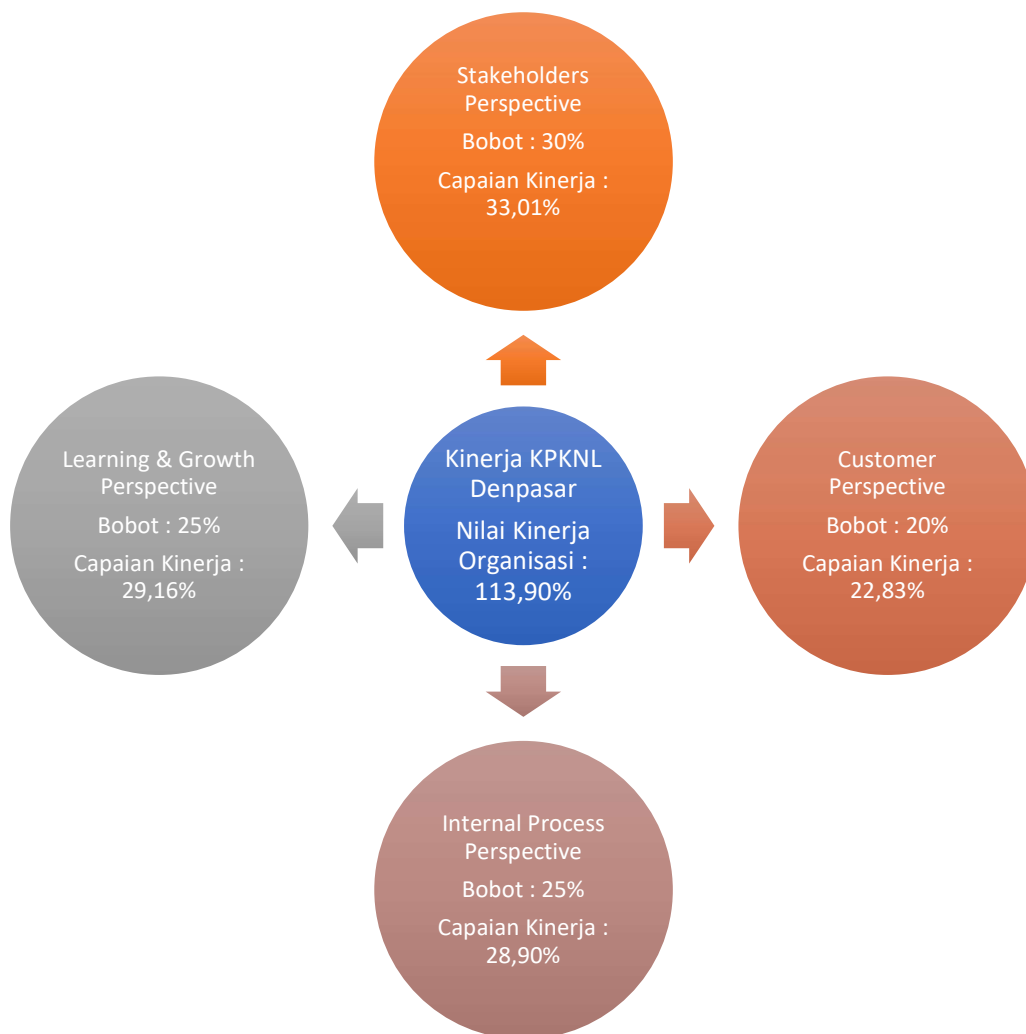
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100
		9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Denpasar adalah sebesar 113,90%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Capaian Kinerja pada Tiap-Tiap Perspektif



KPKNL Denpasar menetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS). Secara umum, sebagian besar IKU Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan 19 (delapan belas) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning (Q3).

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu Three tahun 2024 tersebut, KPKNL Denpasar melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja tahun 2024. Berikut rincian capaian kinerja dan analisis atas 20 IKU KPKNL Denpasar tahun 2024:

Sasaran Strategis, Target, Realisasi, dan Capaian KPKNL Denpasar tahun 2024

Kode	IKU	WC	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks	Indeks max. 120%
Stakeholder Perspective(30%)								33,01%
SS 1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							110,03%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	PIM	100%	135,11%	14%	50%	135,11%	120,00%
1b-CP	Indeks integritas	PIM	89,17	89,23	14%	50%	100,07%	100,07%
Customer Perspective (20%)								22,83%
SS 2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							110,40%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	PIM	71,5%	88,27%	14%	50%	123,46%	120,00%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	PIM	88,5%	87,38%	14%	50%	100,99%	100,99%
SS 3	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal							112,03%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	PIM	100%	143,14%	14%	50%	143,14%	120,00%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	PIM	100%	104,06%	14%	50%	104,06%	104,06%
SS 4	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							120,00%
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	PIM	75	92,19	14%	100%	122,92%	120,00%
Internal Process Perspective (25%)								28,90%
SS 5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							115,83%
5a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	PIM	100%	107,50%	14%	33%	107,50%	107,50%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	PIM	100%	125,15%	14%	33%	125,15%	120,00%
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	PIM	100%	120%	14%	33%	120,00%	120,00%
SS 6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							110,97%
6a-CP	Persentase saldo BKPN	PIM	77%	75,51%	14%	50%	101,94%	101,94%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	PIM	89%	180,83%	14%	50%	180,71%	120,00%
SS 7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							120,00%
7a-CP	Deviasi ketegunaan hasil penilaian	PIM	16%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)								29,16%
SS 8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							118,12%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	PIM	90%	119,00%	14%	50%	132,22%	120,00%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	PIM	85	98,80	14%	50%	118,23%	118,23%
SS 9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							108,42%
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	PIM	100	98,84	14%	50%	98,84%	98,84%
9b-CP	Persentase deviasi data PNBK fungsional DJKN	PIM	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%
SS 10	Komunikasi publik yang efektif							120,00%
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	PIM	80	108	14%	100%	135,00%	120,00%
SS 11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bermilai tambah							120,00%
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	PIM	82	99,78	14%	42%	121,86%	120,00%
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	PIL	100	120	19%	58%	120,00%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (MKO)								113,90%

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel

sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	135,11%	120%
2.	Indeks integritas	89,17	92,44	103,67

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN). Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, Pengelolaan kekayaan negara dikatakan akuntabel dan produktif apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3) Adanya nilai tambah piutang negara berupa PNBPN 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan								
1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	101,93%	160,19%	160,19%	157,14%	157,14%	135,11%	135,11%	
Capaian	101,93%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 135,11%, KPKNL Denpasar telah semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, termasuk melakukan penggalan potensi lelang khususnya dari lelang eksekusi, PNBPN Piutang Negara, dan imbauan terus-menerus kepada satker terkait pengelolaan BMN. Nilai realisasi penerimaan negara diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang sampai dengan triwulan IV tercapai sebesar 135,11% dari target sebesar 100%. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	-	-	-	135,11
2023	100	100	-	-	-	151,39
2022	100	100	-	-	-	158,44

2. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Capaian IKU Indeks Intergitas Tahun 2024 adalah sebagai berikut

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan								
1b-CP Indeks integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		20	20	30	30	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi		20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian		100%	100%	120%	120%	103,67	103,67	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89,17	-	-	-	-	92,44
2023	88	-	-	-	-	89,17
2022	-	-	-	-	-	-

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%	88,27%	120%
2.	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5%	87,36%	100,99%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa								
2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/TLK
Realisasi		92,02%	92,02%	89,44%	89,44%	88,27%	88,27%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2024 memiliki target sebesar 71,5% dengan realisasi sebesar 88,27%. Tahun 2024 seluruh komponen tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Tercapainya seluruh komponen pada IKU tahun 2024 ini tidak terlepas dari intensnya koordinasi KPKNL Denpasar dan satker BMN yang dilakukan oleh seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	71,5%	-	-	-	-	88,27%
2023	68%	-	-	-	-	78,04%
2022	-	-	-	-	-	-

2. Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan

BMN meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pengawasan dan Pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa								
2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	Max/TLK
Realisasi		59,26%	59,26%	62,64%	62,64%	87,36%	87,36%	
Capaian		120%	120%	104,41%	104,41%	100,99%	100,99%	

Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada tahun 2024 memiliki target sebesar 86,5% dengan realisasi sebesar 87,36%. Tahun 2024 seluruh komponen tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	86,5%	-	-	-	-	87,36%
2023	86%	-	-	-	-	94%
2022	85%	-	-	-	-	94,11%

3. Sasaran Strategis 3: Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase realisasi pokok lelang	100%	143,14%	120%
2.	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	113,16%	113,16%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.3 Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal								
3a-CP Persentase realisasi pokok lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	123,14%	194,25%	194,25%	178,92%	178,92%	143,14%	143,14%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% (Rp692.000.000.000,00) dan tercapai sebesar 143,14% (Rp990.521.582.155.00). Capaian yang cukup besar ini tidak lepas dari pelaksanaan lelang Undang-Undang Hak Tanggungan, dan koordinasi secara intens dengan pihak pegadaian.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	143,14%
2023	100%	-	-	-	-	102,30%
2022	-	-	-	-	-	-

2. Persentase penurunan outstanding piutang negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a. PND/ Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

- b. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- c. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- d. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- e. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
- f. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.3 Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal								
3b-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	134,48%	236,09%	236,09%	124,38%	124,38%	113,16%	113,16%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	113,16%	113,16%	

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2024 memiliki target sebesar Rp15.000.000.000,00 (100%) dengan realisasi sebesar Rp17.539.583.252,69 (113,16%). Dengan dilaksanakan kegiatan hingga tercapainya target pada tahun ini, direncanakan juga kegiatan-kegiatan pada tahun 2024 guna mencapai target yaitu, melakukan panggilan, penagihan langsung dan penelitian lapangan, melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA, penyampaian surat Paksa, serta dilaksanakan penyitaan barang jaminan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	113,16%
2023	100%	-	-	-	-	121,57%
2022	100%	-	-	-	-	147,02%

4. Sasaran Strategis 4: Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	75	92,29	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan

surat/nota dinas terkait:

- a. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
- b. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
- c. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
- d. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 1. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 2. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 3. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 4. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 5. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
- e. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.4 Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal								
4a-CP Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/Avg
Realisasi	86,07	89,29	89,29	89,59	89,59	92,29	92,29	
Capaian	114,76%	119,05%	119,05%	119,45%	119,45%	120%	120%	

Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien pada tahun 2024 memiliki target sebesar 75% dengan realisasi sebesar 92,29%. Capaian ini tidak terlepas dari kinerja yang sangat luar biasa dari para Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL Denpasar. Serta koordinasi yang telah dilakukan antara Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dengan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah serta satuan kerja yang mengajukan permohonan penilaian, sehingga proses penilaian dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75	-	-	-	-	92,29%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

5. Sasaran Strategis 5: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	107,50%	107,50%
2.	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	125,15%	120%
3.	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100%	120%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan penswertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau pemblokiran, atau input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, atau produk lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Adapun tujuan IKU ini adalah Mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.5 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif								
5a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi		40,77%	40,77%	60,77%	60,77%	107,50%	107,50%	
Capaian		101,92%	101,92%	101,28%	101,28%	107,50%	107,50%	

Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 107,50%. Menantanginya beberapa target kegiatan strategis seperti penyelesaian

sertifikasi BMN berupa tanah dan penyelesaian SBSK memerlukan koordinasi dengan internal DJKN dan Kementerian/lembaga yang lebih intensif. Salah satu kendala yang cukup krusial ialah terbatasnya SDM pada satker yang menjadi objek target, dan kurangnya awareness PIC BMN pada satker terkait dengan peraturan pengelolaan BMN. Hal ini menjadi penting mengingat saat ini beberapa proses pengelolaan BMN sebagian kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pengguna Barang, sehingga PIC BMN harus memahami regulasi pengelolaan BMN baik itu terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang tersebut.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	107,50%
2023	100%	-	-	-	-	108,84%
2022	100%	-	-	-	-	111,92%

2. Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one

meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.5 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif								
5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	20,61%	41,52%	41,52%	114,47%	114,47%	125,15%	125,15%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 88 (delapan puluh delapan) penyusunan dan penyampaian rekomendasi serta 6 tindak lanjut rekomendasi (100%) dengan realisasi sebesar 112 penyusunan dan penyampaian rekomendasi serta 7 tindak lanjut rekomendasi dengan persentase sebesar 125,15%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	125,15%
2023	100%	-	-	-	-	104,29%
2022	-	-	-	-	-	-

3. Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Idle adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam mengelola aset negara yang tidak terpakai atau tidak optimal digunakan. BMN idle merujuk pada barang milik negara yang tidak digunakan secara aktif dalam mendukung fungsi operasional, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara jika tidak dikelola dengan baik.

Pelaksanaan inventarisasi BMN idle bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset negara tercatat dengan akurat dan dapat dikelola secara efektif. Proses ini meliputi identifikasi, pencatatan, dan penilaian terhadap aset yang idle, serta upaya-upaya optimalisasi, seperti pengalihan penggunaan, pemanfaatan melalui mekanisme sewa atau kerjasama, atau bahkan penghapusan jika aset tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang signifikan.

Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN idle penting karena:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Aset: Melalui inventarisasi yang akurat, instansi dapat mengetahui kondisi BMN secara keseluruhan, mengidentifikasi aset yang idle, dan memaksimalkan pemanfaatan aset tersebut untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.
- b. Pengurangan Beban Biaya Pemeliharaan: BMN yang idle, jika tidak segera dikelola, dapat menimbulkan biaya pemeliharaan yang tidak produktif. Dengan mengidentifikasi aset-aset tersebut, langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu dapat diambil.
- c. Pengoptimalan Pendapatan Negara: Aset yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan pemasukan tambahan bagi negara

melalui pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa, pinjam pakai, atau mekanisme pemanfaatan lainnya.

- d. **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan BMN:** Dengan adanya indeks ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Inventarisasi yang baik akan menciptakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi alat kontrol dalam menjaga integritas pengelolaan BMN.
- e. Untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan inventarisasi BMN idle, setiap instansi diharapkan menerapkan sistem yang terintegrasi, mengutamakan koordinasi antarunit kerja, dan memiliki komitmen untuk memperbaharui data BMN secara berkala. IKU ini berfungsi sebagai pengingat dan pengarah bagi instansi pemerintah agar pengelolaan aset negara lebih efisien, sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.5 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif								
5c-N Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	25%	55%	55%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	25%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	120%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

6. Sasaran Strategis 6: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase saldo BKPN	77%	75,51%	101,94%
2.	Persentase produktivitas lelang	89%	160,83%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Persentase saldo BKPN

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak padapenurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa: BKPN Lunas (SPPNL); BKPN Penarikan (SPPNS); BKPN Dikembalikan

(SKPPN); BKN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); Koreksi Data (BKN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat); BKN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; BKN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDPO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh Kantor Pusat DJKN (Direktorat PKKN).

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.6 Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif								
6a-CP Persentase saldo BKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	96%	90%	90%	81%	81%	77%	77%	Min/TLK
Realisasi	99,18%	89,49%	89,49%	85,34%	85,34%	75,51%	75,51%	
Capaian	96,69%	100,56%	100,56%	94,65%	94,65%	101,94%	101,94%	

Persentase Penyelesaian Berkas BKN pada tahun 2024 memiliki target sebesar 77% dengan realisasi sebesar 75,51% dengan capaian sebesar 101,94%. Penyelesaian berkas BKN ditargetkan sebesar 1.689 BKN dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 1.868 BKN. Pada tahun 2024, berbagai upaya meliputi edukasi dan komunikasi berupa sosialisasi pengurusan piutang negara, panggilan terhadap debitur, penagihan dan penelitian lapangan, penyampaian surat paksa kepada debitur, serta penyitaan barang jaminan telah dilaksanakan hingga akhir Triwulan IV.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	77%	-	-	-	-	75,51%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

2. Persentase produktivitas lelang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Produktivitas Lelang adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang oleh instansi pemerintah, khususnya dalam hal pencapaian target pendapatan negara melalui mekanisme lelang. Lelang adalah proses penjualan barang atau aset melalui penawaran terbuka untuk umum, di mana barang yang dilelang dapat berupa aset pemerintah, seperti Barang Milik Negara (BMN) yang tidak terpakai, atau barang yang disita negara.

Persentase produktivitas lelang menggambarkan seberapa besar hasil lelang yang berhasil dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. IKU ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan lelang berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara dan berjalan sesuai dengan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Fungsi utama dari IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah:

- a. Efisiensi Pengelolaan Aset Negara: Melalui lelang, aset-aset yang tidak lagi digunakan oleh pemerintah, baik itu BMN yang idle maupun barang sitaan, dapat segera dimonetisasi. Produktivitas lelang yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu memaksimalkan pemanfaatan aset tersebut untuk mendatangkan pendapatan bagi negara.
- b. Peningkatan Penerimaan Negara: Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan lelang adalah untuk menambah penerimaan negara. Semakin tinggi persentase produktivitas lelang, semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap keuangan negara, sehingga dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan atau

operasional lainnya.

- c. **Optimalisasi Penggunaan Aset:** IKU ini mendorong setiap instansi yang terlibat dalam pelaksanaan lelang untuk lebih cermat dan efektif dalam memilih barang-barang yang akan dilelang, serta menentukan waktu dan metode lelang yang tepat. Ini membantu menghindari penurunan nilai aset karena penyimpanan yang terlalu lama atau pemanfaatan yang tidak maksimal.
- d. **Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Lelang:** Produktivitas lelang yang diukur dengan indikator kinerja utama ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses lelang. Pelaksanaan lelang yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional akan menghasilkan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pengelolaan aset negara.
- e. **Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah:** IKU Persentase Produktivitas Lelang juga menjadi alat ukur untuk menilai kinerja instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam mengelola dan melaksanakan proses lelang. Kinerja yang baik dalam mencapai atau melampaui target produktivitas lelang menjadi indikator bahwa instansi tersebut mampu bekerja secara profesional dan efisien.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.6 Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif								
6b-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	53,16%	143,17%	143,17%	160,83%	160,83%	160,83%	160,83%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Persentase Produktivitas Lelang pada tahun 2024 memiliki target sebesar 89% dengan realisasi sebesar 160,83% dengan capaian sebesar 120%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan

tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU lama (Non Kolektif).

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89%	-	-	-	-	160,83%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

7. Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi

baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.7 Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional								
7a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Komponen dalam IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian membahas penggunaan hasil penilaian persetujuan pada tahun 2024 yang ditargetkan maksimal sebesar 16%. Tercapainya target IKU ini tidak lepas dari intensitas koordinasi seksi penilaian dan seksi PKN. Tetapi masih saja terdapat nilai persetujuan yang ditetapkan lebih dari hasil penilaian. Namun dalam hal ini, persentasenya jauh lebih kecil dari target deviasi yang ditetapkan yang menunjukkan capaian ketergunaan hasil penilaian tersebut lebih dari 120%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU lama yang bersifat non kolektif.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16%	-	-	-	-	120%
2023	25%	-	-	-	-	120%
2022	-	-	-	-	-	-

8. Sasaran Strategis 8: Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	119%	120%
2.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	98,80	116,23%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Pengembangan kompetensi pegawai mencakup berbagai program pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan bentuk pengembangan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka secara lebih efektif dan efisien.

IKU ini sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Kompetensi pegawai yang baik akan berdampak pada produktivitas kerja, inovasi dalam pelayanan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, baik yang bersifat teknologi maupun regulasi.

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pegawai yang telah mengikuti program

pengembangan kompetensi terhadap total pegawai dalam suatu instansi pada periode tertentu. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar pula perhatian instansi terhadap pengembangan SDM yang dimiliki. IKU ini juga membantu memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara merata dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu pegawai.

Untuk mencapai target IKU ini, instansi pemerintah perlu melakukan pemetaan kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, serta merancang program-program pengembangan yang relevan dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam bentuk e-learning dan pelatihan jarak jauh juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pengembangan kompetensi pegawai.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif								
8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	88,29%	74,29%	74,29%	119%	119%	119%	119%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pada tahun 2024 KPKNL Denpasar memiliki target Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 90% dengan realisasi sebesar 119% dengan capaian sebesar 120%. Realisasi tersebut merupakan hasil beberapa usaha yang sudah dilaksanakan meliputi, pemberian himbauan dan pengingat kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat sesuai kompetensi ataupun sesuai minat masing-masing melalui aplikasi klc2.kemenkeu.go.id dan aplikasi diklat, serta pembuatan daftar pegawai yang masuk pada kategori telah mencapai target JP maupun yang belum mencapai target capaian. Disebabkan adanya penugasan untuk mengikuti diklat, ELearning, agar seluruh pihak dapat mengembangkan kemampuan pegawai.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan),

rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU lama yang bersifat non kolektif.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90%	-	-	-	-	119%
2023	100%	-	-	-	-	120%
2022	-	-	-	-	-	-

2. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif								
8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	85	96,43%	96,43%	98,80	98,80	98,80	98,80	
Capaian	100%	113,45%	113,45%	116,23%	116,23%	116,23%	116,23%	

Pada tahun 2024 KPKNL Denpasar memiliki target Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko sebesar 85% dengan realisasi sebesar 98,80% dengan capaian sebesar 116,23%. Realisasi tersebut merupakan hasil beberapa usaha yang sudah dilaksanakan meliputi mitigasi risiko, penetapan risiko serta usaha untuk merealisasikan manajemen kinerja serta risiko.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU lama yang bersifat non kolektif.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85%	-	-	-	-	98,80%
2023	80%	-	-	-	-	100%
2022	-	-	-	-	-	-

9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kinerja anggaran	90%	100%	120%
2.	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	0%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Indeks kinerja anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Anggaran adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di suatu instansi pemerintah. IKU ini mencerminkan seberapa baik instansi merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik, yang merupakan salah satu sumber daya vital dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.

Indeks Kinerja Anggaran merupakan salah satu ukuran utama dalam memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab, digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Pengelolaan anggaran yang efektif tidak hanya berdampak pada keberhasilan pencapaian program kerja, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Beberapa komponen penting dalam Indeks Kinerja Anggaran adalah:

- a. Perencanaan Anggaran yang Tepat Sasaran: Kinerja anggaran dinilai dari kemampuan instansi dalam merencanakan anggaran secara efektif. Perencanaan anggaran harus berdasarkan kebutuhan nyata, serta diarahkan pada pencapaian target-target prioritas pemerintah. Anggaran yang direncanakan dengan baik memastikan bahwa setiap alokasi dana memiliki tujuan yang jelas dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang relevan.
- b. Penyerapan Anggaran yang Efektif: Indeks ini juga mengukur seberapa efektif instansi pemerintah dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Penyerapan anggaran yang baik adalah ketika dana yang telah dianggarkan digunakan tepat waktu dan sesuai dengan peruntukannya. Penyerapan anggaran yang lambat atau tidak sesuai target sering kali menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Kinerja anggaran juga mencerminkan seberapa efisien anggaran digunakan. Efisiensi berarti bahwa anggaran digunakan secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil yang

diharapkan. Instansi yang memiliki kinerja anggaran yang baik adalah yang mampu memanfaatkan anggaran secara optimal, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap dana publik digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal.

- d. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur Keuangan: IKU ini menilai apakah pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan laporan keuangan, serta penggunaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pelaporan dan Akuntabilitas Anggaran: Aspek penting lain dari Indeks Kinerja Anggaran adalah pelaporan dan akuntabilitas. Instansi pemerintah harus mampu melaporkan penggunaan anggaran secara tepat waktu, transparan, dan akurat. Laporan keuangan yang baik mencerminkan transparansi dalam penggunaan dana publik serta memberikan jaminan kepada publik bahwa anggaran telah dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel								
9a-CP Indeks kinerja anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	113,62	99,54	99,54	97,52	97,52	120	120	
Capaian	113,62%	99,54%	99,54%	97,52%	97,52%	120%	120%	

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini meliputi Indeks Kinerja Anggaran. Indeks Kinerja Anggaran pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100% dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 120%. Dengan Capaian tersebut pada perjalanannya KPKNL Denpasar telah menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan, melakukan pengisian Capaian Output dengan tepat waktu, dan berkoordinasi dengan KPPN terkait pengisian Capaian Output pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU lama yang bersifat non kolektif.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	120%
2023	95,5%	-	-	-	-	110,67%
2022	-	-	-	-	-	-

2. Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785 Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%

Ketentuan tambahan:

- a. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi
(Contoh: PNBPN disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
- b. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan

Deviasi.

(Contoh: a. PNBPN disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBPN disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)

- c. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

(Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBPN Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel								
9b-CP Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN digunakan sebagai penyediaan kelengkapan data Laporan Keuangan tahun 2024 dalam mengukur tingkat keandalan data PNBPN yang tersaji pada Laporan Keuangan Eselon I dan data yang pada Laporan Kinerja Lelang dan Laporan Kinerja Piutang Negara. Target pada indikator kinerja ini di tahun 2024 sebesar 10%, dengan dasar pengambilan data berdasarkan aplikasi OMSPAN, Focus PN, dan Dropbox Lelang. Capaian Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN s.d. periode Q4 2024 menciptakan realisasi sebesar 0% atau capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut didasarkan pada tidak adanya deviasi angka pada data PNBPN di aplikasi-aplikasi tersebut.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU lama yang bersifat non kolektif.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	10%	-	-	-	-	0%
2023	15%	-	-	-	-	0%
2022	-	-	-	-	-	-

10. Sasaran Strategis 10: Komunikasi publik yang efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80%	108%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu.

Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.10 Komunikasi publik yang efektif								
10a-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Avg
Realisasi	116	108	108	108	108	108	108	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 80%, dengan menciptakan realisasi sebesar 108% atau capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut didasarkan pada kewajiban menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik

yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80%	-	-	-	-	108%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

11. Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Denpasar mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	99,76	120%
2.	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100%	120%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif fungsi Unit Kepatuhan Internal dalam mengawasi, mengelola risiko, serta menjaga kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur di suatu instansi pemerintah. Unit Kepatuhan Internal (UKI) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mendukung tercapainya

tata kelola yang baik (good governance) dan integritas organisasi. Unit Kepatuhan Internal bertindak sebagai pengawas internal yang bertugas untuk memantau kepatuhan pegawai dan manajemen terhadap berbagai aturan, baik aturan internal organisasi maupun regulasi eksternal. UKI juga berperan dalam mencegah dan mendeteksi adanya penyimpangan, fraud, atau potensi risiko yang dapat merugikan organisasi. Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah								
11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		15	15	20	20	82	82	Max/TLK
Realisasi		15	15	20	20	99,76	99,76	
Capaian		100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Indeks Efektivitas Unit KeEpatuhan Internal (UKI) di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 82%, dengan menciptakan realisasi pada akhir Triwulan IV sebesar 99,76% atau capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82	-	-	-	-	98,76
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

2. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK
Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

- a. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
- b. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
- c. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

- a. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
- b. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- c. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada

masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SS.11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah								
11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi		100	100	100	100	120	120	
Capaian		100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100%, dengan menciptakan realisasi pada akhir Triwulan IV sebesar 120% atau capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	120%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2024, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Denpasar Tahun Anggaran 2024. Sumber data realisasi tersebut diambil dari Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara)

Realisasi Anggaran KPKNL Denpasar Tahun Anggaran 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Modal	230.375.000	224.369.280	97,39%
Belanja Barang	2.150.320.000	1.881.999.838	87,52%
Total	2.380.695.000	2.106.369.118	92,46%

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Denpasar tahun 2024 adalah sebesar 92,46%. Sejak tahun 2021, belanja pegawai sudah terpusat di Eselon I (DJKN), sehingga kantor vertical tidak dibebankan belanja pegawai lagi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Denpasar Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Denpasar dalam Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelesaian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Denpasar. Sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Denpasar pada periode berikutnya.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

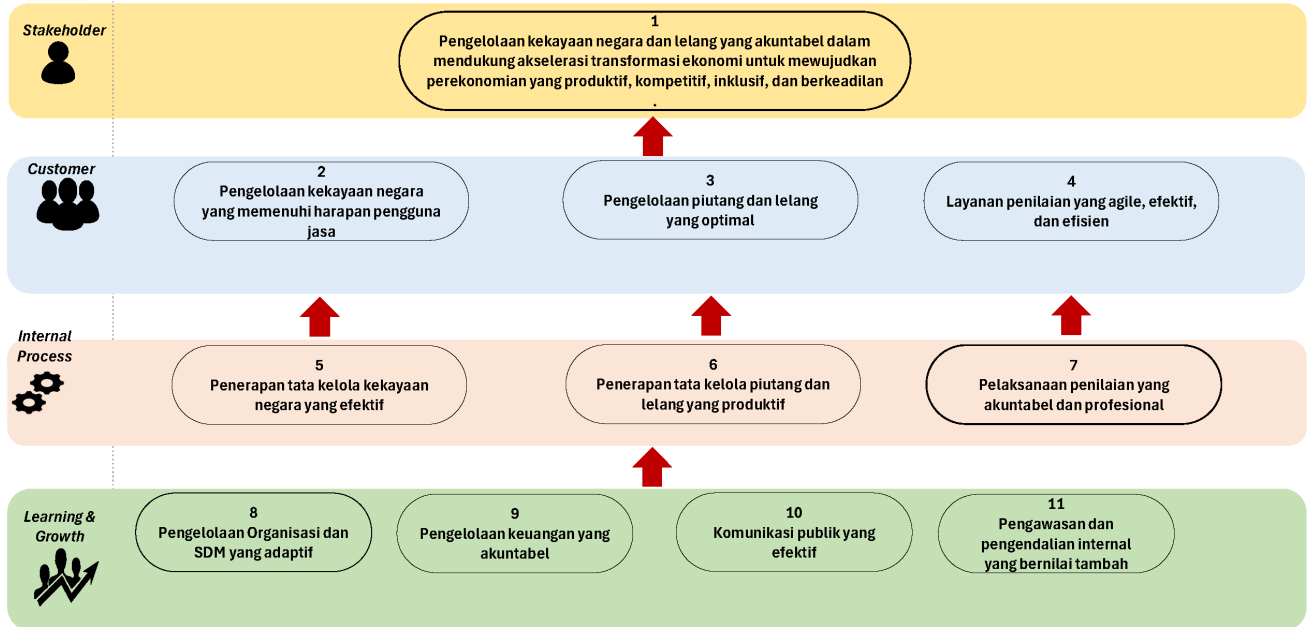
LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR PK - 01/WKN.14 / 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024



Peta Strategi KPKNL Denpasar Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 100 (Rp42.380.200.000)
		1b-CP	Indeks integritas 89,17
2.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 71,5
		2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN 86,5
3.	Pengelolaan piutang dan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang 100 (Rp692 miliar)
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara 100 (Rp6.160.000.000)
4.	Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian 75
5.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan 100
		5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 100
		5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>Idle</i> 100
6.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara 77
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang 89
7.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian 16
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai 90
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko 85

9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10
10.	Komunikasi publik yang efektif	10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 18.444.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 724.518.000
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 83.699.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.483.956.000
5. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 25.844.000
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 32.196.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar



Ditandatangani Secara Elektronik
I Ketut Arimbawa

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan piutang dan lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien							
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
5a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	10	32	32	80	80	100	100
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>Idle</i>	25	55	55	70	70	100	100
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	77	77
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	90	90
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Denpasar,



Ditandatangani Secara Elektronik
I Ketut Arimbawa



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar,



Ditandatangani Secara Elektronik
I Ketut Arimbawa



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	I Ketut Arimbawa	NAMA	Sudarsono	
NIP	196902241989121001	NIP	196912141996031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	PembinaTingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp42.380.200.000,00)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	89,17	Penerima Layanan



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan piutang dan lelang yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp692 Milyar)	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100% (Rp 6,16 Milyar)	Penerima Layanan
4.	Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	Penerima Layanan
5.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	Proses Bisnis
		Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>Idle</i>	100	Proses Bisnis
6.	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	77% (1689 BKPN)	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	89%	Proses Bisnis



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase deviasi data PNBPF fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
 I Ketut Arimbawa
 196902241989121001



Ditandatangani secara elektronik
 Sudarsono
 196912141996031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	34 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
4	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%



9	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
10	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>Idle</i>	25	55	55	70	70	100	100
11	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	77%	77%
12	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
13	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	90%	90%
15	Indeks kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
18	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat capaian unit kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

I Ketut Arimbawa
196902241989121001



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono
196912141996031002



Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan 1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 1b-CP Indeks integritas		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa 2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK 2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.3 Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal 3a-CP Persentase realisasi pokok lelang 3b-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.4 Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal 4a-CP Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.5 Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif 5a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan 5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 5c-N Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.6 Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif 6a-CP Persentase saldo BKPN 6b-CP Persentase produktivitas lelang		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.7 Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional 7a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif 8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai 8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.9 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 9a-CP Indeks kinerja anggaran 9b-CP Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.10 Komunikasi publik yang efektif 10a-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-

SS.11 Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah 11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) 11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK		
No	Kelengkapan	Check List
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; • Standar Nasional (jika ada) 	√
		√
		√
		√
		√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2023 yang telah di-upload ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	-